

# Implementasi nilai pancasila dalam menghadapi tantangan multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia

Fatwa Ulayya Haniifah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: fatwaulayyahaniifah@gmail.com

## Kata Kunci:

Pancasila, multikulturalisme, pluralisme, toleransi, persatuan bangsa.

## Keywords:

Pancasila, multiculturalism, pluralism, tolerance, national unity.

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari aspek suku, agama, budaya, maupun bahasa. Kondisi tersebut menjadikan multikulturalisme dan pluralisme sebagai karakter utama kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, di tengah perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, keberagaman juga menghadirkan berbagai tantangan seperti intoleransi, diskriminasi, konflik sosial, serta menguatnya politik identitas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan

multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, toleransi, dan harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Akan tetapi, implementasi nilai Pancasila masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai kebangsaan, pengaruh media sosial, serta munculnya sikap eksklusivisme kelompok. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi digital, serta kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan implementasi yang konsisten, Pancasila dapat tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga integrasi nasional di tengah dinamika masyarakat multikultural Indonesia.

## ABSTRACT

Indonesia is a country with a very high level of diversity in terms of ethnicity, religion, culture, and language. This condition makes multiculturalism and pluralism the main characteristics of Indonesian society. However, amid the development of globalization and advances in information technology, diversity also presents various challenges such as intolerance, discrimination, social conflict, and the strengthening of identity politics. This article aims to analyze the implementation of Pancasila values in facing the challenges of multiculturalism and pluralism in Indonesia. The method used in this article is a literature study with a descriptive-analytical approach through the examination of books, scientific journals, regulations, and various relevant academic sources. The results of the discussion indicate that the values of Pancasila have a strategic role as guidelines in maintaining unity, tolerance, and social harmony within Indonesia's diverse society. Nevertheless, the implementation of Pancasila values still faces several obstacles, including the low level of public understanding of national values, the influence of social media, and the emergence of group exclusivism. Therefore, it is necessary to strengthen character education, improve digital literacy, and enhance cooperation among the government, educational institutions, and society in internalizing Pancasila values in everyday life. Through consistent implementation, Pancasila can remain the primary foundation for maintaining national integration amid the dynamics of Indonesia's multicultural society.



## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut mencakup perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, hingga latar belakang sosial masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Keberagaman ini pada dasarnya merupakan kekayaan bangsa yang dapat memperkuat identitas nasional apabila dikelola dengan baik. Namun, di sisi lain, pluralitas masyarakat juga dapat menjadi tantangan serius apabila tidak disertai dengan kesadaran nasional, toleransi, dan rasa persatuan yang kuat.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, multikulturalisme dan pluralisme telah menjadi realitas yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebangsaan. Multikulturalisme mengandung makna pengakuan terhadap keberagaman budaya dalam masyarakat, sedangkan pluralisme menekankan pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam kehidupan bersama. Konsep tersebut sejalan dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, yang mencerminkan persatuan di tengah keberagaman. Akan tetapi, perkembangan sosial, politik, dan teknologi informasi di era modern menghadirkan tantangan baru dalam menjaga harmoni masyarakat multikultural.

Fenomena meningkatnya intoleransi, diskriminasi, ujaran kebencian, serta konflik sosial berbasis identitas menunjukkan bahwa nilai persatuan dan toleransi masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya. Perkembangan media sosial yang sangat pesat juga turut mempercepat penyebaran informasi provokatif, hoaks, dan narasi kebencian yang dapat memicu polarisasi di masyarakat. Selain itu, menguatnya politik identitas dalam berbagai momentum politik sering kali memperlihatkan bagaimana perbedaan suku, agama, maupun kelompok digunakan sebagai alat kepentingan tertentu. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan integrasi nasional apabila tidak diantisipasi secara tepat.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Pancasila memiliki posisi yang sangat penting sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada dasarnya telah dirancang untuk menjadi pedoman dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadilan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan beragama, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan sila Persatuan Indonesia menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi tantangan multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia.

Namun, dalam realitasnya masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan praktik kehidupan sosial masyarakat. Secara teoritis, Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan nilai toleransi, kemanusiaan, dan persatuan. Fenomena diskriminasi terhadap kelompok tertentu, konflik sosial

berbasis identitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberagaman menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama.

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, sekaligus mengkaji berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **Pembahasan**

### **Dialektika Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Realitas Sosial Indonesia**

Indonesia merupakan negara multikultural dengan keberagaman suku, agama, ras, bahasa dan budaya yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan bagi persatuan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tersebut, multikulturalisme dan pluralisme menjadi konsep penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Multikulturalisme menekankan pengakuan terhadap keberagaman budaya serta hak setiap kelompok untuk mempertahankan identitasnya tanpa diskriminasi, sedangkan pluralisme menekankan sikap menerima, menghormati, dan hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang menempatkan keberagaman sebagai bagian dari identitas nasional. Namun, keberagaman juga berpotensi memunculkan konflik apabila tidak disertai toleransi dan kesadaran kolektif. Perkembangan media sosial memperbesar tantangan tersebut melalui penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda berbasis identitas yang memicu polarisasi sosial. Selain itu, globalisasi turut membawa pengaruh individualisme dan konsumerisme yang dapat melemahkan solidaritas sosial dan budaya gotong royong.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat multikultural memerlukan landasan ideologi yang mampu menjaga harmoni sosial. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar nilai yang menekankan toleransi, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, keberagaman dapat menjadi kekuatan nasional apabila dikelola melalui semangat persatuan dan penghormatan terhadap perbedaan.

### **Pancasila sebagai Fondasi Persatuan dalam Masyarakat Multikultural**

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman moral dalam menjaga integrasi nasional di tengah masyarakat yang plural. Menurut (Kaelan, 2016), Pancasila merupakan sistem filsafat yang bersumber dari nilai budaya dan kepribadian bangsa

Indonesia sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi perekat sosial dalam kehidupan masyarakat yang multikultural.

Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, menegaskan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan toleransi anrataumat beragama. Nilai ini menjadi penting di tengah meningkatnya intoleransi dan ujaran kebencian berbasis agama. Sila kedua, *kemanusiaan yang adil dan beradab*, menekankan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun budaya sehingga menjadi dasar dalam mencegah diskriminasi sosial.

Sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, menempatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Menurut (Winataputra, 2008), konsep persatuan dalam Pancasila mencerminkan semangat multikulturalisme Indonesia yang menempatkan keberagaman sebagai bagian dari identitas nasional. Akan tetapi, implementasi nilai persatuan masih menghadapi tantangan berupa politik identitas dan polarisasi sosial di ruang digital.

Sila keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, menekankan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan dialog, sedangkan sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat. Ketimpangan ekonomi dan marginalisasi sosial berpotensi memicu konflik apabila tidak diatasi secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sosial secara nyata.

### **Tantangan Implementasi Nilai Pancasila di Era Modern**

Implementasi nilai pancasila di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Media sosial mempercepat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, propaganda politik identitas, dan provokasi berbasis suku maupun agama. Menurut (Duryat et al., 2021), perkembangan era *post-truth* telah memperbesar potensi konflik sosial karena masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh opini emosional dibandingkan fakta objektif. Dalam situasi tersebut, memperhatikan bahwa ruang digital dapat memperkuat polaritas sosial dalam Masyarakat multicultural. Selain itu, intoleransi masih muncul dalam bentuk diskriminasi dan pembatasan kebebasan beragama. Globalisasi juga mendorong berkembangnya individualisme dan konsumerisme yang berpotensi melemahkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Tantangan lain terlihat dari rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai kebangsaan karena Pendidikan Pancasila masih sering bersifat teoritis dan kurang kontekstual.

Ketimpangan sosial dan ekonomi turut memperbesar potensi konflik horizontal, sementara berkembangnya radikalisme dan ekstremisme mengancam harmoni masyarakat multikultural. Menurut (Az Zahra, 2025), penguatan identitas nasional berbasis Pancasila menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan radikalisme di era modern. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila memerlukan penguatan secara menyeluruh agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial.

## **Strategi Penguatan Implementasi Nilai Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Multikulturalisme dan Pluralisme**

Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas nasional lahir dari nilai-nilai budaya, sejarah, bahasa, serta cita-cita bersama yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Menurut Romi Faslah dalam buku *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan*, identitas nasional adalah wujud karakter bangsa yang terbentuk melalui pengalaman sejarah dan kebudayaan yang berkembang secara kolektif di tengah masyarakat. Identitas nasional tidak hanya berfungsi sebagai simbol kebangsaan, tetapi juga sebagai alat pemersatu dalam menghadapi keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia.

Identitas nasional tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia, serta berbagai simbol kenegaraan lainnya. Keberadaan identitas nasional menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan negara multikultural dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, identitas nasional berfungsi sebagai fondasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mudah terpecah akibat perbedaan yang ada.

Identitas nasional juga memiliki fungsi sebagai alat perlindungan diri bangsa dari pengaruh negatif globalisasi. Arus globalisasi yang semakin kuat berpotensi menggeser nilai-nilai budaya lokal dan menimbulkan krisis identitas, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena seperti meningkatnya kecenderungan meniru budaya asing, lunturnya rasa cinta terhadap produk lokal, hingga menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan identitas nasional Indonesia. Oleh karena itu, penguatan identitas nasional melalui pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila menjadi langkah penting dalam menjaga eksistensi bangsa di tengah perkembangan zaman (Faslah, 2024).

Berbagai tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di era modern menunjukkan bahwa keberadaan Pancasila sebagai dasar negara belum sepenuhnya diikuti oleh penghayatan dan penerapan yang optimal dalam kehidupan masyarakat. Fenomena intoleransi, politik identitas, polarisasi sosial, radikalisme, hingga penyebaran hoaks berbasis suku dan agama menjadi bukti bahwa persatuan bangsa masih menghadapi ancaman yang cukup serius. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat implementasi nilai Pancasila agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia.

Strategi penguatan implementasi Pancasila tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya melalui pendekatan simbolis semata. Penguatan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, sosial, budaya, media digital, hingga kebijakan negara. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan kebijakan sosial masyarakat. Salah satu langkah paling penting dalam memperkuat implementasi nilai Pancasila adalah melalui pendidikan karakter

berbasis kebangsaan. Implementasi nilai multikultural dalam pembelajaran di perguruan tinggi, seperti pada jurusan PIPS UIN Malang, menunjukkan bahwa nilai demokratis, toleransi, dan kerjasama dapat diinternalisasi melalui kegiatan diskusi dan presentasi yang menghargai perbedaan (Cholifah, 2020). Hal ini membuktikan bahwa Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir dan karakter generasi muda sebagai penerus bangsa. Dalam konteks masyarakat multikultural, pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga membangun kesadaran sosial, toleransi, dan sikap menghargai keberagaman secara berkelanjutan.

Selama ini, pembelajaran Pancasila di berbagai lembaga pendidikan masih sering bersifat teoritis dan berorientasi pada hafalan sila semata. Akibatnya, banyak peserta didik memahami Pancasila hanya sebagai materi pelajaran tanpa mampu menghubungkannya dengan realitas sosial di masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan nilai-nilai Pancasila kurang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan berbasis multikulturalisme memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa yang demokratis, toleran, dan menghargai keberagaman. Penguatan identitas nasional melalui Pendidikan multikultural di sekolah menjadi kunci agar generasi muda memiliki jati diri bangsa yang kuat di Tengah arus globalisasi (Sulalah et al., 2024). Pendidikan harus diarahkan untuk membentuk warga negara yang mampu hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang plural.

Pendidikan Pancasila perlu dikembangkan melalui metode pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif. Peserta didik harus diajak memahami berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti intoleransi, diskriminasi, konflik sosial, dan penyebaran hoaks, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif nilai-nilai Pancasila. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Selain pendidikan formal, penguatan implementasi nilai Pancasila juga harus dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama pembentukan karakter individu. Nilai toleransi, gotong royong, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan perlu ditanamkan sejak dini melalui pola pendidikan keluarga yang demokratis dan humanis. Apabila keluarga gagal menanamkan nilai sosial yang baik, maka individu akan lebih mudah terpengaruh oleh paham intoleran maupun perilaku individualistik yang berkembang di masyarakat.

Di tengah masyarakat multikultural Indonesia, penguatan budaya gotong royong juga menjadi strategi penting dalam menjaga persatuan bangsa. Gotong royong merupakan nilai sosial yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Nilai tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun budaya. Namun, perkembangan globalisasi dan modernisasi menyebabkan budaya gotong royong mulai mengalami penurunan. Masyarakat modern cenderung lebih individualistik dan kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Kondisi ini dapat melemahkan hubungan sosial antar masyarakat dan meningkatkan potensi konflik sosial.

Nilai gotong royong merupakan salah satu bentuk implementasi nyata Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, revitalisasi budaya gotong

royong perlu dilakukan melalui kegiatan sosial masyarakat, seperti kerja bakti, forum musyawarah warga, kegiatan lintas agama, dan berbagai bentuk interaksi sosial yang mampu memperkuat solidaritas masyarakat. Selain penguatan pendidikan dan budaya sosial, strategi implementasi nilai Pancasila juga harus diarahkan pada penguatan literasi digital masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Media sosial tidak hanya menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi juga memengaruhi pola pikir dan perilaku sosial masyarakat.

Dalam banyak kasus, media digital justru menjadi ruang berkembangnya ujaran kebencian, hoaks, propaganda politik identitas, dan radikalisme. Penyebaran informasi yang bersifat provokatif dapat memicu konflik sosial apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menerima informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi digital menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat modern. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi secara objektif. Masyarakat perlu dibekali kesadaran untuk menggunakan media digital secara etis dan bertanggung jawab agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang bersifat diskriminatif maupun intoleran.

Penelitian (Jayadi et al., 2022) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural berbasis nilai kebangsaan memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan era digital. Penguatan kemampuan berpikir kritis dapat membantu masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah dipengaruhi oleh narasi yang bertentangan dengan nilai persatuan bangsa. Strategi penguatan implementasi nilai Pancasila juga memerlukan penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dalam kehidupan sosial. Sikap moderat sangat penting untuk mencegah berkembangnya fanatisme dan radikalisme yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama membutuhkan pendekatan moderasi agar hubungan antarumat beragama tetap harmonis. Dalam beberapa kasus, konflik sosial berbasis agama muncul akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap hak beragama orang lain. Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa moderasi beragama merupakan strategi penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Melalui moderasi beragama, masyarakat diharapkan mampu menjalankan keyakinannya tanpa merendahkan atau memaksakan keyakinan kepada kelompok lain. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat implementasi nilai Pancasila melalui kebijakan publik yang adil dan inklusif. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia dapat memicu kecemburuan sosial dan memperbesar potensi konflik antar kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, sila keadilan sosial dalam Pancasila harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan dan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Keadilan sosial sangat penting dalam membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika masyarakat merasa memperoleh hak yang setara dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik, maka rasa persatuan dan solidaritas nasional akan semakin kuat. Sebaliknya, ketidakadilan sosial dapat memunculkan rasa ketidakpuasan yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. Di samping itu, penguatan implementasi nilai Pancasila juga membutuhkan keteladanan dari para pemimpin bangsa. Elite politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan figur publik memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Sikap intoleran, ujaran provokatif, dan praktik politik identitas yang dilakukan elite politik dapat memperbesar polarisasi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin bangsa harus mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai persatuan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Keberagaman Indonesia hanya dapat dijaga apabila masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun golongan tertentu. Semangat *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus diperkuat sebagai identitas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern.

Pluralisme pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap keberadaan perbedaan dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan agama, budaya, bahasa, suku, maupun pandangan hidup. Dalam kehidupan berbangsa, pluralisme tidak hanya dimaknai sebagai keberagaman semata, tetapi juga sebagai sikap menghormati, menerima, dan hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan tersebut. Indonesia sebagai negara multikultural menjadikan pluralisme sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Pluralitas ini merupakan sebuah keniscayaan bagi Masyarakat Indonesia yang mencakup aspek etnis, Bahasa, budaya, hingga agama (Zainuddin, 2013).

Keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan nasional yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Namun, pluralisme juga dapat menjadi tantangan apabila tidak disertai dengan sikap toleransi dan kesadaran kebangsaan yang kuat. Dalam buku *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan*, dijelaskan bahwa integrasi nasional sangat berkaitan erat dengan identitas nasional karena persatuan bangsa hanya dapat tercapai apabila masyarakat mampu menerima dan menghargai keberagaman yang ada.

Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga harmonisasi pluralisme di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi dasar bahwa meskipun masyarakat Indonesia berbeda-beda dalam suku, agama, budaya, dan bahasa, seluruh rakyat tetap berada dalam satu kesatuan bangsa Indonesia.

Di era globalisasi, tantangan pluralisme semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang dapat memicu konflik berbasis identitas. Penyebaran ujaran kebencian, intoleransi, serta radikalisme menjadi ancaman nyata bagi persatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan multikultural, penanaman nilai toleransi, serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila agar pluralisme tetap berjalan dalam koridor persatuan nasional. Dengan demikian, pluralisme tidak menjadi

sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan dalam memperkokoh identitas nasional Indonesia (Faslah, 2024).

Dengan demikian, strategi penguatan implementasi nilai Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan karakter, penguatan budaya gotong royong, literasi digital, moderasi beragama, kebijakan sosial yang adil, serta keteladanan para pemimpin bangsa. Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol formal negara, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Apabila nilai-nilai Pancasila mampu diimplementasikan secara konsisten, maka keberagaman masyarakat Indonesia dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan. Sebaliknya, tanpa implementasi yang nyata, keberagaman justru berpotensi menjadi sumber konflik yang mengancam persatuan nasional. Oleh karena itu, penguatan implementasi nilai Pancasila merupakan langkah strategis dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia di tengah tantangan multikulturalisme dan pluralisme yang semakin kompleks.

## Kesimpulan dan Saran

Keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural yang memiliki kekayaan sosial dan budaya yang sangat besar. Namun, di sisi lain, keberagaman juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan nilai yang mampu menjadi pedoman bersama dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, Pancasila memiliki posisi yang sangat penting sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi tantangan multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila mampu menjadi fondasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran, harmonis, dan berorientasi pada persatuan nasional. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol formal kenegaraan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Akan tetapi, implementasi nilai-nilai Pancasila di era modern masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Perkembangan globalisasi, meningkatnya politik identitas, penyebaran hoaks di media digital, intoleransi, radikalisme, hingga melemahnya solidaritas sosial menjadi faktor yang dapat mengancam persatuan bangsa. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Dalam beberapa kondisi, nilai toleransi dan persatuan sering kali tergeser oleh kepentingan kelompok maupun fanatisme identitas tertentu.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan implementasi nilai Pancasila masih menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Penguatan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formal maupun simbolis semata,

tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter berbasis kebangsaan, penguatan budaya gotong royong, literasi digital, moderasi beragama, serta kebijakan sosial yang adil menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat multikultural.

Selain itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, hingga generasi muda harus berperan aktif dalam membangun budaya sosial yang toleran dan demokratis. Keteladanan para pemimpin bangsa juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap nilai persatuan dan keadilan sosial.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks, masyarakat Indonesia perlu memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai pengaruh luar tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Pancasila harus dijadikan sebagai filter nilai dalam menghadapi perubahan sosial agar bangsa Indonesia tetap mampu berkembang mengikuti kemajuan zaman tanpa meninggalkan karakter budaya dan jati diri kebangsaannya.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar implementasi nilai Pancasila tidak hanya difokuskan pada aspek teoritis di lingkungan pendidikan, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan Pancasila perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial generasi muda saat ini. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan yang mendukung terciptanya keadilan sosial, perlindungan terhadap keberagaman, serta penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi.

Pada akhirnya, keberhasilan menjaga persatuan bangsa Indonesia sangat bergantung pada kemampuan seluruh masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Apabila nilai-nilai tersebut mampu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka keberagaman masyarakat Indonesia tidak akan menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan sosial.

## Daftar Pustaka

- Az Zahra, S. (2025). Penguatan Identitas Nasional Indonesia melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di Era Globalisasi. *UIN Law Review: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 156–176. <https://doi.org/10.15408/ulr.v4i2.50008>
- Cholifah, N. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Mata Kuliah Geografi Regional pada Jurusan Pips. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(4), 710–720. <http://repository.uin-malang.ac.id/8170/>
- Duryat, M., Sholeh, H. M., Arfan, F., Muchsin, Faisal, Zein, I., & Muhammad Usman. (2021). Bhinneka Tunggal Ika dan Konflik Sosial; (Khazanah Multikultural Indonesia Di Era Post Truth). *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.54423/jsk.v2i1.63>

- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8(1), eo8828.
- Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
- Sulalah, S., Nadifah, M., & Musthopa, R. H. (2024). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Pendidikan Multikultural. <http://repository.uin-malang.ac.id/22139/>
- Winataputra, U. S. (2008). Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 14(75), 1009–1027. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v14i75.364>
- Zainuddin, M. (2013). Pluralisme Agama dalam Analisis Konstruksi Sosial. UIN Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/883/>